

MEREDUKSI ORGANISASI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DI MUHAMMADIYAH UNTUK MENUJU PROFESIONALISASI

Ali Imron A.M.

Program Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Jl. Ahmad Yani Pabelan Kartasura Tromol Pos 1 Surakarta 57102

Telpon (0271) 717412 Faks 715448 Ponsel: 081329107250

email: aliimron_almakruf@yahoo.com

ABSTRACT

Condition of Indonesian women are now independent politically and rhetorically. Formally, women recognized as equal to men, given equal opportunities and no rejection of something (title for example) with the reason a person is female. The phenomenon of Indonesian women's movement, including women Muhammadiyah, is now experiencing a shift from concessions toward professionalization. Only problem is, how far women are able to utilize this opportunity to have the competence to compete with men. Therefore, it is necessary to reconceptualize and restructure organizations such as Muhammadiyah, IMM, HMI and so forth that are still in dichotomy male-female.

Key Word: *The reduction, an organization of men and women, Muhammadiyah, professionalization.*

قد تقدمت أحوال النساء الاندونيسية تقدما سياسية كانت ام اجتماعية. من الناس من يعترف أن المرأة متساوية بالرجل في عدة المناسبات. وسوف لا ترد المرأة التي تحترق في الانتخابات في الشؤون المختلفة كالسياسة والاقتصادية وغير ذلك لأن معظم الناس في المجتمعات قد اتفقوا ان المرأة كالرجل. وهذه حالة المرأة الاندونيسية ومنها المرأة المحمدية. فهل تستطيع المرأة أن تستفيد ونستيق مع الرجل في هذه المناسبة الذهبية لاجل هذا ينبغي على رابطة الطلبة المحمدية أن تعود تفكر متقنا، لأنها لم توافق بهذه المسألة موافقة كافة.

الالفاظ الرئيسية: التحفيظ، جمعية الرجال والنساء، المحمدية و المهنية.

PENDAHULUAN

Di balik keberhasilan gerakan dan kepemimpinan perempuan di berbagai bidang kehidupan, ternyata masih tersimpan mitos perempuan sebagai manusia kelas dua (*the second class, the second sex*) di dalam kehidupan masyarakat. Tidak hanya masyarakat Indonesia yang masih banyak berpandangan bahwa perempuan merupakan sosok manusia kelas dua, tetapi juga di berbagai negara terutama negara berkembang. Hal ini tidak terlepas dari pandangan sosiohistoris dan kultural yang membedakan perempuan dengan laki-laki.

Sejak dahulu hingga kini, secara universal perempuan memang berbeda dengan laki-laki. Perbedaan itu tidak hanya tampak dalam biologis atau fisiologis yang terjelma dalam jenis kelamin (seks) tetapi juga dalam pandangan konstruksi sosio-kultural yang lebih dikenal dengan istilah jender. Perempuan sering dikatakan sebagai sosok makhluk yang lembut, indah, tidak asertif, tidak agresif, dan cenderung mengalah. Adapun laki-laki sering ditampilkan sebagai sosok manusia yang besar, kokoh, asertif, agresif, dan dominan.

Perbedaan laki-laki-perempuan itu membawa implikasi yang jauh dalam kehidupan sosial. Termasuk dalam bidang politik, demokrasi, organisasi dan kepemimpinan perempuan. Permasalahannya kini adalah bagaimana pola gerakan dan kepemimpinan perempuan Muhammadiyah kontemporer, dan

bagaimana agar gerakan perempuan Muhammadiyah mampu mengangkat eksistensinya secara mandiri?

MENCARI AKAR SUBORDINASI PEREMPUAN: PENYELEWENGAN SEJARAH

Meskipun terdapat banyak konsep yang baik mengenai perempuan, dalam praktiknya fakta menunjukkan bahwa perempuan di banyak komunitas berada di bawah dominasi laki-laki. Mau tak mau, keadaan ini telah berarti segalanya bagi perempuan dalam sejarah kebudayaan manusia. Sejarah manusia, baik yang sakral (yang diambil dari kitab-kitab suci atau mitos) maupun yang sekular (yang disusun secara ilmiah) senantiasa menunjukkan sebagai sejarah laki-laki. Dari perspektif sejarah, jelas laki-laki dan perempuan tidak setara. Tegasnya masyarakat di berbagai negara mayoritas masih merupakan masyarakat patriarkal.

Dikotomi laki-laki-perempuan juga tercermin dalam pengkotakan "pekerjaan laki-laki dan pekerjaan perempuan" yang lebih dikenal dengan pembagian kerja secara seksual (*sexist*). Jelas perbedaan laki-laki-perempuan tidak saja ditentukan faktor biologis (tampak pada jenis kelamin) melainkan juga faktor sosial budaya (tercermin dalam jender).

Jender memang tidak bersifat universal, tetapi hierarki jender dapat dikatakan universal. Berbagai

studi lintas budaya menunjukkan bahwa perempuan selalu berada dalam posisi subordinatif. Karena subordinatif perempuan tidak dapat dijelaskan dengan perbedaan jenis kelamin, maka timbullah konsep jender. Sampai saat ini belum ada satu pun teori yang dianggap mampu menerangkan akar subordinasi perempuan dengan memuaskan.

Teori yang dikembangkan untuk menjelaskan hierarki jender menurut Gailey (1987), ada empat kelompok yakni: (1) Teori adaptasi awal, yang berpandangan bahwa adaptasi awal manusia merupakan dasar pembagian kerja secara seksual, sekaligus menjadi dasar subordinasi perempuan di bawah laki-laki, (2) Teori teknik-lingkungan, yang menyatakan bahwa upaya untuk mengontrol pertumbuhan penduduk sudah menjadi persoalan sejak zaman dulu. Subordinasi perempuan dalam konteks ini berakar pada peran reproduktifnya, (3) Teori sosiobiologi, yang menjelaskan bahwa dominasi laki-laki muncul sebagai akibat seleksi alam, dalam hal ini berkaitan dengan ketahanan tubuh, dan (4) Teori struktural, yang menyatakan bahwa perempuan mempunyai status yang lebih rendah dibanding laki-laki, sekaligus otoritas yang lebih sedikit daripada laki-laki. Karena, perempuan berhubungan dengan arena domestik, sedangkan laki-laki lebih terlibat dalam arena publik.¹

Pembagian bidang kehidupan menjadi sektor publik dan domestik ini dianggap universal. Dasar pembagian ini adalah tanggung jawab perempuan dalam proses kehamilan dan perawatan anak. Dengan demikian status relatif perempuan bergantung pada derajat keterlibatan mereka dalam arena publik dan partisipasi laki-laki dalam arena publik. Teori struktural berargumentasi, bahwa subordinasi perempuan itu bersifat kultural, yang berakar pada pembagian kerja berdasarkan jender.

Di pihak lain, seperti kebudayaan pada umumnya, kebudayaan Indonesia menempatkan perempuan sebagai *the second sex* ataupun instrumen bagi laki-laki. Bahkan, konsep kebudayaan Jawa menempatkan perempuan sebagai *konco wingking* (teman di belakang). Artinya, perempuan dipandang sekedar teman hidup yang tugasnya di belakang, menangani urusan di rumah tangga. Hal itu tercermin dalam ungkapan-ungkapan proverbial yang sangat mengagungkan laki-laki.

Padanan perempuan di Jawa adalah *wanita*: artinya *wani ditata*, sehingga kebanyakan perempuan Jawa (tradisional) bersikap *nerima*, termasuk terhadap sikap dan perlakuan laki-laki terhadapnya. Juga lingkup gerakan perempuan bersifat domestik, di seputar rumah

¹ Lihat Gailey, Christine Ward. "Evolutionary Perspectives on Jender Hierarchy" dalam Beth B. Hess dan Myra Marx Ferree, eds. *Analyzing Jender, a Handbook of Social Science Research*. Sage Publications, Inc. 1987.

tangga, berkisar dari dapur ke sumur, dari sumur ke kasur, dari kasur ke dapur, dan begitu seterusnya. Atau, perempuan itu tugas pokok dan fungsinya adalah *masak, macak, lan manak* yang berarti memasak, berhias diri dan melahirkan. Ini berarti perempuan dianggap sekadar menjadi pelayan laki-laki yang tugasnya dari memasak, menyajikannya di meja makan, mencuci pakaian, memaut diri agar suaminya senang, hingga menemaninya di tempat tidur.² Lebih ekstrem lagi adalah ungkapan yang menyatakan bahwa istri itu kedudukannya di samping suami adalah *swarga nunut neraka katut* yang berarti kebahagiaan dan/atau penderitaan perempuan/ istri sangat bergantung pada laki-laki/ suami. Itu semua mencerminkan bahwa kedudukan perempuan adalah subordinat laki-laki. Betapa perempuan dianggap tidak mempunyai peran penting dalam kehidupan. Perempuan sekadar “suplemen” bagi laki-laki, tidak memiliki kemandirian dan eksistensi nyata. Perempuan mengalami *Cinderella Complex*, atau sindrom manusia kelas dua. Ironisnya perempuan seakan dibenarkan masyarakat jika dia cukup mengharap pertolongan laki-laki dalam menghadapi tantangan. Akibatnya, perempuan tidak akan dapat berperan banyak sebagai agen perubahan sosial (*social agent*) yang mampu menentukan jalannya sejarah, bahkan sering

menjadi manusia yang tertindas oleh sejarah. Manusia yang mampu “menyejarah” demikian memerlukan tantangan besar agar dapat berkarya besar. Syarat terpenting untuk itu adalah adanya kebebasan dan kemandirian, meski bukan berarti hidup soliter.

Cinderella Complex yang menimpa perempuan kelas menengah ke atas akan menimbulkan kemandulan kreativitas. Adapun perempuan kelas bawah, tidak cukup keberanian untuk menentang diskriminasi yang dialaminya. Karena itu, tantangan utama perempuan sebelum ia menjadi agen perubahan sosial adalah kondisi psikologis dalam dirinya selain sistem patriarkis dalam masyarakat yang sangat tidak kondusif dalam mengangkat kemandirian dan eksistensi perempuan.

Dalam kebudayaan masyarakat Indonesia yang dikenal religius dan mayoritas beragama Islam, ayat al-Qur’ān atau hadits Rasulullah Saw. sering menjadi dasar/ alasan yang kurang tepat. Misalnya, ajaran Islam *Arrijālu qawwāmūna ‘alā an-nisā’*, “Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan”³ yang ditafsirkan secara sempit juga turut mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap eksistensi perempuan yang berada di bawah dominasi laki-laki. Hal ini mudah dipahami bilamana kita memahami kultur masyarakat Indonesia yang religius, yang

² lihat Al-Ma’rūf, 1995

³ Q.S. an-Nisā’: 34

menempatkan ajaran agama sebagai landasan hukum dan tradisi kehidupannya. Hukum dan tradisi yang terformulasikan dalam pola hidup berakar pada ajaran agama, seperti tercermin dalam ungkapan yang populer di masyarakat Minang.⁴

Padahal jika dicermati, mestinya kata *qawwamuna* itu bukan berarti 'laki-laki sebagai pemimpin atau pengatur perempuan' seperti lazimnya kebanyakan penafsiran orang selama ini. Kata *qawwamun* merupakan term ekonomis, dan bukan bilogis. Artinya, laki-laki lebih diartikan sebagai pencari nafkah, bukan pemimpin.⁵ Lebih-lebih jika dicermati ayat berikutnya, *Arrijalu qawwāmūna 'alā an-nisā' bimā fadh-dhalallāhu ba'dhahum 'alā ba'dhin wabimā anfaqu min amwālihīm*. Artinya, "Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan karena Allah telah memberikan kelebihan pada yang satu dari yang lain, dan karena mereka memberi nafkah dari hartanya." Kalimat "Allah telah memberikan kelebihan pada satu dari yang lain, dan karena mereka memberi nafkah dari hartanya", kiranya jelas menunjukkan (dapat ditafsirkan) bahwa laki-laki dan perempuan masing-masing memiliki kelebihan dan keduanya saling melengkapi. Jadi, dalam Islam, laki-laki dan perempuan tidak bersifat hierarkis atau struktural melainkan bersifat fungsional.

Pemahaman ini akan lebih tegas lagi jika kita kaitkan dengan ayat al-Quran yang lain: *Hunna libasul lahum waantum libasul lahunna*. Artinya, "Mereka (perempuan) itu pakaian (bagi) kamu sekalian (laki-laki), dan kamu sekalian (laki-laki) merupakan pakaian bagi mereka (perempuan)". Jelas, keduanya – laki-laki dan perempuan – saling melengkapi dan setara, tidak subordinatif.

Dapat pula ditambahkan betapa banyak ayat al-Quran yang menyatakan bahwa "Apabila kamu sekalian beramal shalih, baik laki-laki maupun perempuan, maka Allah akan memberikan pahala dan surga bagi mereka." Juga ayat yang menyatakan, "Yang paling baik di antara kamu sekalian adalah yang paling baik ketaqwaanya". Ada juga ayat yang menyatakan bahwa "Seorang laki-laki tidak akan menerima hasil suatu pekerjaan kecuali atas usahanya sendiri, demikian pula perempuan tidak akan menerima hasil suatu pekerjaan kecuali atas usahanya". Ayat-ayat itu jelas menegaskan, bahwa siapa yang lebih bertaqwa – baik laki-laki maupun perempuan – maka itulah manusia yang paling mulia di hadapan Allah. Sekaligus ayat ini juga menyejajarkan laki-laki dan perempuan dalam kedudukan yang sama di mata Allah, hanya bobot ketaqwaanlah yang membuat mereka berbeda. Tidak ada pembedaan

⁴ *Hukum basendi adat, adat basendi syara', syara' basendi Kitabullah*. Artinya, hukum berlandaskan adat, adat berlandaskan agama, dan agama berlandaskan al-Quran".

⁵ lihat pandangan Riffaat Hassan dalam Wajidi, 1995.

laki-laki dengan perempuan.

Hal lain yang membuat pandangan kultural bahwa perempuan itu sekadar pelengkap laki-laki adalah dongeng tentang Siti Hawa yang terjelma dari tulang rusuk Adam. Cerita ini jelas bukan bersumber dari al-Quran (sebab tidak ada satu ayat pun yang menyatakan demikian), melainkan dari kitab-kitab kuno agama Kristen (Perjanjian Lama) dan juga Hadits-hadits — yang tentu saja masih perlu diteliti validitasnya (keshahihannya) —. Berdasarkan asumsi bahwa hanya al-Quran satu-satunya kitab yang memiliki otoritas sebagai sumber dan otoritas sebagai sumber yang tak terbantahkan, maka jelaslah bahwa tidak satu sumber pun yang valid yang menyatakan adanya subordinasi perempuan dari laki-laki.

Dengan demikian, sebenarnya adanya pandangan atau mitos bahwa perempuan itu hanya suplemen atau subordinasi dari laki-laki selama ini merupakan “penyelewengan sejarah” tentang perempuan. Oleh karena itu, jika tidak ada penyelewengan sejarah itu maka sebenarnya tidak perlu ada gerakan emansipasi perempuan. Tegasnya, yang diperlukan kini adalah “pelurusan sejarah tentang perempuan”.

PEMBERONTAKAN KEBUDAYAAN

Situasi kebudayaan dengan semangat subordinatif perempuan demikian sangat dominan di Indonesia hingga pertengahan abad XX.

Kondisi itu harus berakhir dengan datangnya kebudayaan modern. Ketika para kawula muda Jawa terpelajar mendirikan Budi Utomo (BU), maka yang terjadi sesungguhnya adalah pemberontakan kebudayaan. Pemberontakan itu sangat penting artinya dalam sejarah Indonesia, karena ia menjadi tonggak bangkitnya nasionalisme (Indonesia) dan sekaligus mundurnya kebudayaan etnis termasuk Jawa. Cara berpikir modern yang berbeda dengan yang diajarkan tradisi masyarakat saat itu, adalah landasan pemberontakan kebudayaan itu.

Fenomena yang menarik adalah bahwa sebelumnya telah terjadi pemberontakan kebudayaan serupa dengan skala lebih kecil, yang dilakukan seorang gadis yang berpikiran amat maju pada zamannya, justru dari dalam salah satu benteng kebudayaan Jawa saat itu: kamar *pingitan dalem* kabupaten Jepara. Pemberontakan Kartini dari kamar *pingitan dalem* kabupaten Jepara itu menjadi lebih bermakna karena ia mewakili kaum perempuan yang menjadi manusia kelas dua dalam kebudayaannya. Meski tidak ada hubungan langsung antara BU dengan Kartini, keduanya melihat kebudayaan dalam perspektif baru yang sama, yang lebih banyak mengandalkan dan menghargai rasionalitas dan kompetensi pribadi manusia.

Hal yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa posisi Kartini sebagai perintis pemberontakan kebudayaan dilakukannya secara *committed*.

Boleh jadi ia kebetulan seorang perempuan yang memberontak terhadap dominasi laki-laki, namun tidak kebetulan bahwa itu semua karena ia berpikiran maju dan rasional. Karena itu, tidak kebetulan pula jika Kartini menjadi feminis Indonesia pertama.

GERAKAN PEREMPUAN MUHAMMADIYAH KONTEMPORER: DARI KONSESI KE PROFESIONALISASI

Tanpa bermaksud mengklaim bahwa kondisi sekarang berkat perjuangan Kartini, kedudukan perempuan di Indonesia kini kurang lebih sama dengan yang dicitacitakan Kartini. Perempuan Indonesia sekarang sudah merdeka secara politis dan retorik. Secara formal perempuan diakui sama dengan laki-laki, diberi kesempatan yang sama dan tidak ada penolakan terhadap sesuatu (jabatan misalnya) dengan alasan seseorang adalah perempuan. Merdeka secara politis, karena realitanya (pada tingkat sosiologis laki-laki tetap mendominasi kehidupan), jika dalam suatu persaingan perempuan kalah dengan laki-laki, hal itu karena kekalahan objektif, bukan dipolitisasi. Sri Mulyani, misalnya, bisa menjadi Menteri Keuangan Indonesia. Demikian pula Megawati, bisa juga menjadi Presiden Republik Indonesia, dan masih banyak lagi perempuan “perkasa” lainnya.

Sejalan dengan itu, maka yang terjadi dalam gerakan kepemimpinan-

an perempuan, termasuk di kalangan Muhammadiyah, semestinya adalah profesionalisasi, bukan konsesi. Ketika sedikit banyak laki-laki tergeser dalam beberapa posisi, maka yang terjadi adalah pergantian pihak yang tidak memiliki kompetensi oleh mereka yang memiliki kompetensi. Perubahan ini telah dapat diterima karena alasan rasional, yakni tidak terjadi atas dasar asumsi ideologis, tetapi atas dasar pertimbangan daya guna yang lebih besar. Dengan kata lain, atas dasar pertimbangan profesional, dan bukan konsesi politik.

Mengenai meleburnya tokoh-tokoh Aisyiah ke dalam PP Muhammadiyah sudah dibahas paling tidak sejak Muktamar Muhammadiyah ke-41 di Aceh dan diintensifkan dan telah disepakati pada Muktamar Muhammadiyah ke-42 di Jakarta. Sayang sekali hingga kini keputusan itu belum direalisasikan secara konkret dan adil. Tetap saja Aisyiah – organisasi perempuan Muhammadiyah – berdiri di samping Muhammadiyah. Mengapa para tokoh perempuan Muhammadiyah tidak “berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah” dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah dalam jajaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah, atau Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, dan seterusnya? Mengapa masih saja berdiri PP Aisyiah di samping PP Muhammadiyah?

Guna lebih meningkatkan peran kepemimpinan perempuan dan gerakan perempuan pada umum-

nya, maka agaknya perlu dilakukan gerakan “Kartini kotemporer”. Gerakan ini tidak hanya bertujuan menghilangkan diskriminasi tersebut terhadap perempuan Indonesia (hal ini sudah berlalu), tetapi lebih dari itu gerakan ini haruslah memberantas beberapa ideologi yang menjadi sumber dari persepsi yang mempersulit perempuan Indonesia untuk mengembangkan diri mereka sebagai manusia mandiri, bukan suplemen kehidupan laki-laki. Karena, kemandirian adalah kunci utama menuju eksistensi perempuan setara dengan laki-laki.

Di samping itu, agaknya perlu pula dikembangkan budaya tandingan (*counter culture*) untuk melawan budaya militer dan budaya konsumtif yang sedang menjadi arus utama. Bentuk dari budaya tandingan tersebut, meminjam istilah Hafidz (1995) adalah otonomi dan karakteristik feminin. Otonomi berarti kompetensi untuk mengatakan “tidak” terhadap keinginan pihak lain yang bermaksud mendominasi atau memaksakan kekuasaannya. Karakteristik feminin diartikan sebagai sifat antikekerasan, memelihara, menumbuhkan, menyayangi, intuitif, kreatif, dan sebagainya sebagai lawan dari karakteristik maskulin (rasional, keras, merusak, menakutkan, persaingan, mengejar keuntungan, dan sebagainya) yang saat ini dominan.⁶

Restrukturisasi Organisasi: Mereduksi Dikotomi Perempuan-Laki-laki

Dalam hal gerakan dan kepemimpinan perempuan di Indonesia, tampaknya gerakan mereka masih diwarnai sikap ideologis dan dihadapi oleh pihak luar yakni laki-laki, dengan sikap sama. Dalam konteks itulah, agaknya kemajuan kaum perempuan di Indonesia masih cenderung bersifat konsensional atau ideologis. Perempuan masih banyak diberi karena pertimbangan politis dan ideologis, bukan karena kompetensi mereka. Konsesi pada akhirnya akan mengecewakan, karena tidak mengubah posisi ketergantungan perempuan pada laki-laki.

Contoh menarik kedudukan konsensional yang diberikan atas dasar pemikiran ideologis adalah apa yang terjadi pada organisasi IMMAWATI-anggota IMM perempuan dan KOHATI-anggota HMI perempuan. Begitu pun AISYIAH yang mendampingi Muhammadiyah. Hal ini mencerminkan adanya “kompleks identitas”. Artinya, setelah perempuan relatif bebas bergerak, gerakan perempuan cenderung menunjukkan identitas dirinya sebagai organisasi perempuan, sekadar untuk membedakan diri dari laki-laki. Di satu pihak perempuan dihargai dengan diberi wadah tersendiri, namun di lain

⁶ Hafidz, Wardah. “Sumbangan Gerakan Perempuan dalam Proses Demokratisasi Masyarakat Indonesia” dalam Fauzi Ridjal dkk. (Ed.). *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Hatta. 1995.

pihak mereka sebenarnya mengurung diri sehingga tidak akan pernah sama dengan anggota laki-laki.

Pembedaan demikian memang memberi kesempatan kepuasan psikologis, karena dengan begitu perempuan dapat menunjukkan arti penting eksistensinya. Namun hal ini sekaligus mengundang bahaya yakni perempuan terperangkap dalam kemasan formalitas atau retorika politik. Perempuan (Aisyiah) dipandang setara dengan laki-laki (Muhammadiyah) hanya karena telah memiliki organisasi, padahal sesungguhnya organisasi perempuan yang eksklusif justru menunjukkan ketidaksetaraan perempuan dengan laki-laki. Jika kemerdekaan perempuan berhenti pada tingkat formalitas politik, maka yang terjadi adalah manipulasi, atau kemerdekaan tanpa substansi. Tegasnya, penonjolan identitas ini justru merupakan pengakuan inferioritas perempuan di hadapan laki-laki, karena dalam praktik sehari-hari (secara sosiologis, bukan politis) perempuan masih dianggap kelas dua. Dalam keadaan demikian, perempuan (Aisyiah) meminta keistimewaan dan mendapat perlindungan dari laki-laki (Muhammadiyah). Pengusaha atau sarjana perempuan tidak pernah menonjolkan prestasi mereka lebih besar daripada kenyataan bahwa mereka adalah perempuan.

Jika kondisi itu dipertahankan maka sangat sulit untuk menciptakan tokoh pemimpin perempuan (Aisyiah) yang mampu berkompetisi dengan pemimpin laki-laki (Muham-

madiyah). Artinya, anggota perempuan dihargai karena keperempuanannya, bukan kompetensinya. Hal itu jelas merupakan pembagian yang *sexist*, yang memang sangat mendasar tetapi sekaligus naif karena hanya memperhatikan jenis kelamin manusia. Untuk itu, organisasi besar semacam Muhammadiyah, HMI, dan IMM yang tentunya berorientasi pada intelektual dan profesional, kiranya pembagian seksis itu perlu dikaji ulang karena sudah tidak relevan lagi dengan eksistensi kaum perempuan kontemporer.

Tegasnya, sudah saatnya para tokoh perempuan "perkasa" Aisyiah selayaknya mampu berkompetisi dengan para tokoh Muhammadiyah dalam Muktamar Muhammadiyah. Sehingga, PP Muhammadiyah pasca-Muktamar ke-43 tahun 2010/ Satu Abad Muhammadiyah kelak diisi oleh para tokoh yang benar-benar memiliki kapabilitas, dan akuntabilitas dalam kepemimpinannya tanpa memandang laki-laki atau perempuan. Siapa pun, baik laki-laki maupun perempuan, yang memiliki kompetensi dapat menduduki PP Muhammadiyah, tidak lagi terjadi dikotomi PP Muhammadiyah dan PP Aisyiah yang bersifat konsesif. Itulah yang dimaksud gerakan perempuan Muhammadiyah bergerak dari konsesi menuju ke profesionalisasi.

Kemerdekaan politis itu belum menyelesaikan segala persoalan hubungan laki-laki-perempuan. Meminjam retorika populer, tugas utama perempuan Indonesia seka-

rang adalah mengisi kemerdekaan politik yang telah dicapai, dengan meningkatkan kualitas intelektual dan kompetensi, bukan lagi emansipasi. Sebab, sekali lagi emansipasi itu sudah tidak relevan lagi. Jadi, yang diperlukan sekarang adalah bagaimana kaum perempuan mengejar ketertinggalannya dari laki-laki dari berbagai aspek agar kemerdekaan politik yang telah dicapai itu dapat benar-benar menjadi realitas, bukan sekedar mitos.

Sesungguhnya kini telah berlaku suatu kompromi antara laki-laki-perempuan. Kompromi itu menampung kepentingan mereka bersama – dan ini sulit untuk dibantah – yang dalam bahasa kebudayaan yakni untuk mencapai kebahagiaan. Untuk itulah perempuan harus membuat kesepakatan dan transaksi dengan laki-laki. Transaksi ini harus terjadi, karena feminisme radikal yang menjauhkan perempuan dari laki-laki tidak (atau belum) dapat diterima di Indonesia. Karena itu, perempuan harus maju bersama dengan laki-laki yang – suka atau tidak suka – dominan. Perempuan sebagai pendamping laki-laki inilah yang kemudian oleh pemerintah dijadikan “Ideologi nasional resmi” untuk menangani politik perempuan. Munculnya Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan mudah dipahami dari kacamata ini.

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN: PROSPEK DAN TANTANGAN- NYA

Pada masa Orde Baru kepemimpinan perempuan dengan segala organisasi dan gerakannya seperti Dharma Wanita, PKK, dan lain-lain di lingkungan departemen atau pemerintahan, justru dianggap kehilangan peran dan signifikansinya dalam pergulatan menentukan arah transformasi sosial budaya yang tengah berlangsung dalam masyarakat kita. Selain kondisi politik masa Orde Baru yang cenderung menghindari daya kritis dan inovatif mereka, secara internal kepemimpinan perempuan juga mengalami masalah. Pada organisasi-organisasi tua dan aktivasinya, perasaan telah menyelesaikan tugas akhirnya menjadikan mereka merasa sudah waktunya pensiun. Jika organisasinya tidak bubar dan masih melakukan berbagai aktivitas, pada intinya perhatian mereka banyak terfokus pada romantisme masa lalu dengan mengagumi berbagai keberhasilan perjuangannya. Mereka sibuk membongkar pasang pasal-pasal hak keperempuanan dalam perkawinan, kegiatan khas keperempuanan, seolah-olah zaman tidak bergerak dan permasalahan yang dihadapi kepemimpinan perempuan masih sama dengan abad XIX atau sebelumnya.

Masyarakat kita sekarang sedang mengalami suatu proses perubahan yang sangat cepat menuju masyarakat industri. Proses itu telah memunculkan modal besar sebagai kekuatan baru, di samping birokrasi dan militer. Ketiga kekuatan dominan itulah (uang, kekuasaan, dan kekuatan) yang saat ini menentukan hampir segala aspek kehidupan dalam masyarakat. Kecenderungan utama masyarakat industri adalah komoditasi, termasuk komoditasi manusia. Dengan bantuan teknologi yang maju pesat, kekuatan-kekuatan dominan telah menjadi mayoritas masyarakat sebagai komoditi yang lemah posisinya dan konsumen yang pasif. Mayoritas perempuan, karena kondisi dan kapasitasnya yang cenderung lebih tertinggal dibanding laki-laki dalam banyak faktor penting, telah menjadi pihak yang paling rentan sebagai objek komoditi. Masalah TKW, buruh perempuan di sektor industri, dan para pekerja seks komersial (PSK) di industri pariwisata, adalah wajah bopeng dari permasalahan perempuan dewasa ini. Dalam peran sebagai konsumen, perempuan juga menduduki posisi penting sebagai objek utama. Iklan-iklan di media massa, baik cetak maupun elektronik adalah contoh yang tidak berlebihan dalam konteks ini. Banyak perempuan yang dengan demikian mudah menyediakan diri menjadi objek bagi masyarakat laki-laki dan "menjual diri" dengan memamerkan kecantikan, aurat, dan kemolekan tubuhnya yang

indah kepada publik dalam iklan atau promosi industri. Hal itu dilakukan semata-mata demi memperoleh segepok uang tanpa memedulikan harkat dan martabatnya sebagai manusia yang semestinya menjunjung tinggi kemanusiaan, harga diri, dan eksistensinya. Sebuah perilaku yang ironis bahkan kontraproduktif dipandang dari perspektif jender yang ingin memperjuangkan kesetaraan laki-laki dengan perempuan sebagai subjek dan subjek, bukan subjek dan objek.

PENUTUP

Mengakhiri pembicaraan ini, perlu dikemukakan bahwa pada dasarnya fenomena gerakan perempuan Indonesia, termasuk perempuan Muhammadiyah, kini mengalami pergeseran. Gerakan perempuan kontemporer menunjukkan perubahan yakni dari konsesi (dulu) ke profesionalisasi (kini). Hanya permasalahannya, seberapa jauh perempuan mampu memanfaatkan peluang itu dengan memiliki kompetensi untuk berkompetisi dengan laki-laki. Jika ternyata tokoh-tokoh perempuan kalah bersaing sehingga posisi kepengurusan PP Muhammadiyah diduduki mayoritas laki-laki, maka bukan berarti kepemimpinan perempuan belum diakui, melainkan tak lebih dari kompetensinya yang masih kalah dengan laki-laki.

Kemandirian perempuan, baik dalam sikap maupun dalam memenuhi kebutuhan sendiri, merupakan

modal paling penting dalam mewujudkan gerakan dan kepemimpinan perempuan Indonesia yang prospektif. Untuk itu, mau tidak mau perempuan harus mampu berkompetisi dengan laki-laki dengan meningkatkan kualitas diri baik dalam intelektual, manajemen organisasi, kepemimpinan maupun kompetensi lain, jika tidak ingin kaum perempuan dianggap sebagai manusia kelas dua. Karena, pada gilirannya, – dan kini sudah tampak – kepemimpinan perempuan tidak lagi konsensional atau bersifat politis melainkan profesional.

Untuk itu, agaknya sudah saatnya dilakukan rekonseptualisasi dan restrukturisasi pada organisasi-organisasi semacam Muhammadiyah, HMI, IMM, dan sebagainya yang masih – langsung atau tidak langsung – membuat dikotomi laki-laki-perempuan. Akan lebih baik jika

tidak ada Aisyiah, KOHATI, atau IMMAWATI, yang ada adalah Muhammadiyah, HMI, dan IMM dengan kepengurusan yang diduduki oleh para tokoh yang profesional baik laki-laki maupun perempuan. Sebab, dengan demikian tokoh pemimpin perempuan akan berkompetisi dengan laki-laki dalam satu organisasi Muhammadiyah dan akan dapat membuktikan dirinya mampu menjadi mitra laki-laki, bukan lagi sekadar suplemen laki-laki. Atau, perempuan bukan sekadar sebagai pelengkap penderita? Bagaimana para Kartini dan Aisyiah muda, siapkah untuk berkompetisi dengan laki-laki dalam Muktamar Muhammadiyah ke-43 tahun 2010 ini? Jawabannya tentu terpulang pada eksistensi dan profesionalitas kaum perempuan itu sendiri. Waktulah yang akan mengujinya.

DAFTAR PUSTAKA

- A.M., Ali Imron. 2003. "Signifikansi Ilmu-ilmu Humaniora dalam Pembangunan Bangsa: Perspektif 50 Tahun Indonesia Merdeka" dalam Maryadi dan Abdullah Aly (Ed.). *Transformasi Budaya*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Gailey, Christine Ward. 1987. "Evolutionary Perspectives on Gender Hierarchy" dalam Beth B. Hess dan Myra Marx Ferree, eds. *Analyzing gender, a Handbook of Social Science Research*. Sage Publications, Inc.
- Hafidz, Wardah. 1995. "Sumbangan Gerakan Perempuan dalam Proses Demokratisasi Masyarakat Indonesia" dalam Fauzi Ridjal dkk. (Ed.). *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Hatta.
- Jassin, H.B. 1978. *Al-Quranul Karim Bacaan Mulia*. Jakarta: Djambatan.